

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peran koneksi politik dalam usaha bisnis sudah dibuktikan pada beberapa penelitian sebelumnya. Han & Zhang (2018) mengungkapkan bahwa nilai perusahaan dapat dipengaruhi oleh adanya koneksi politik perusahaan, kinerja perusahaan meningkat, serta kepercayaan investor untuk berinvestasi pada perusahaan yang terhubung dengan politik meningkat (Maaloul dkk., 2018).

Jasa auditor dari perusahaan audit yang berskala Big 4 sering kali digunakan oleh perusahaan terkoneksi dengan politik (Guedhami dkk., 2014), hal ini juga memberikan jaminan kepada pemegang saham minoritas tidak khawatir terhadap pengalihan sumber daya perusahaan. Pada sisi lain bahwa koneksi politik ini dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan yang berukuran besar seperti: perusahaan di bidang kimia, infrastruktur, investasi dan industri lainnya (Harymawan dkk., 2017).

Koneksi politik juga dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap biaya audit perusahaan (Ariningrum dan Diyanty, 2017), karena tingginya risiko perusahaan apabila perusahaan tersebut terkoneksi politik, sehingga dewan komisaris bersama pihak komite audit menginginkan kualitas audit yang baik dari auditor.

Studi ini mengkaji dari sisi komisaris dan direksi independen yang terkoneksi politik, karena beberapa hasil studi yang mengkaji tentang direksi independen terkoneksi politik telah dilakukan di beberapa negara maju dan negara berkembang (seperti di Korea dan China), hasilnya bahwa berpengalamannya direksi independen di bidang politik dapat mengurangi kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan (Kong dkk., 2019). Di sisi lain juga mengungkapkan bahwa koneksi politik yang ada di direksi independen memiliki nilai yang berarti bagi pemegang saham minoritas, meskipun kepentingannya sering diambil alih oleh pemegang saham pengendali (Hu, Karim, Lin, & Tan, 2020).

Hasil penelitian Lei (2018) menjelaskan bahwa saham perusahaan akan menurun sebesar 3,61% dalam sepuluh hari, apabila mantan pejabat pemerintah yang diangkat menjadi direktur independen hilang dari perusahaan. Ini mengartikan bahwa ada reaksi negatif dari investor apabila perusahaan tidak terkoneksi politik. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dikatakan bahwa belum ada hasil penelitian yang memberikan secara keseluruhan bukti dan manfaat dari direktur independen terkoneksi politik. Untuk itu penelitian ini sangat penting dilakukan karena selama ini penelitian yang mengangkat tentang komisaris dan direktur independen yang memiliki koneksi politik terhadap luaran perusahaan (biaya hutang, kualitas laba, kinerja keuangan serta riset dan pengembangan) masih kurang, dan lebih khusus objeknya di Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan model *dual-board sytem (two tier)*, yang mana dalam perusahaan memiliki dua dewan yang dipisahkan yaitu dewan komisaris dan dewan direksi. Dewan direksi atau dewan

eksekutif bertugas dan bertanggung atas kegiatan operasional perusahaan, sedangkan dewan komisaris atau dewan non eksekutif bertugas untuk mengawasi atau memonitoring kegiatan yang dilakukan oleh dewan direksi (Bezemer dkk., 2014; Wati, 2017).

Keanggotaan dewan komisaris terdiri dari presiden komisaris / komisaris utama, anggota komisaris dan komisaris independen. Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan terbuka telah diatur dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa perusahaan dapat mengangkat komisaris independen berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Komisaris independen dalam perusahaan ditunjuk dari kalangan luar perusahaan, dengan kata lain tidak terafiliasi atau tidak memiliki hubungan dengan pihak pemegang saham utama, anggota direksi, atau anggota komisaris lainnya dalam perusahaan tersebut.

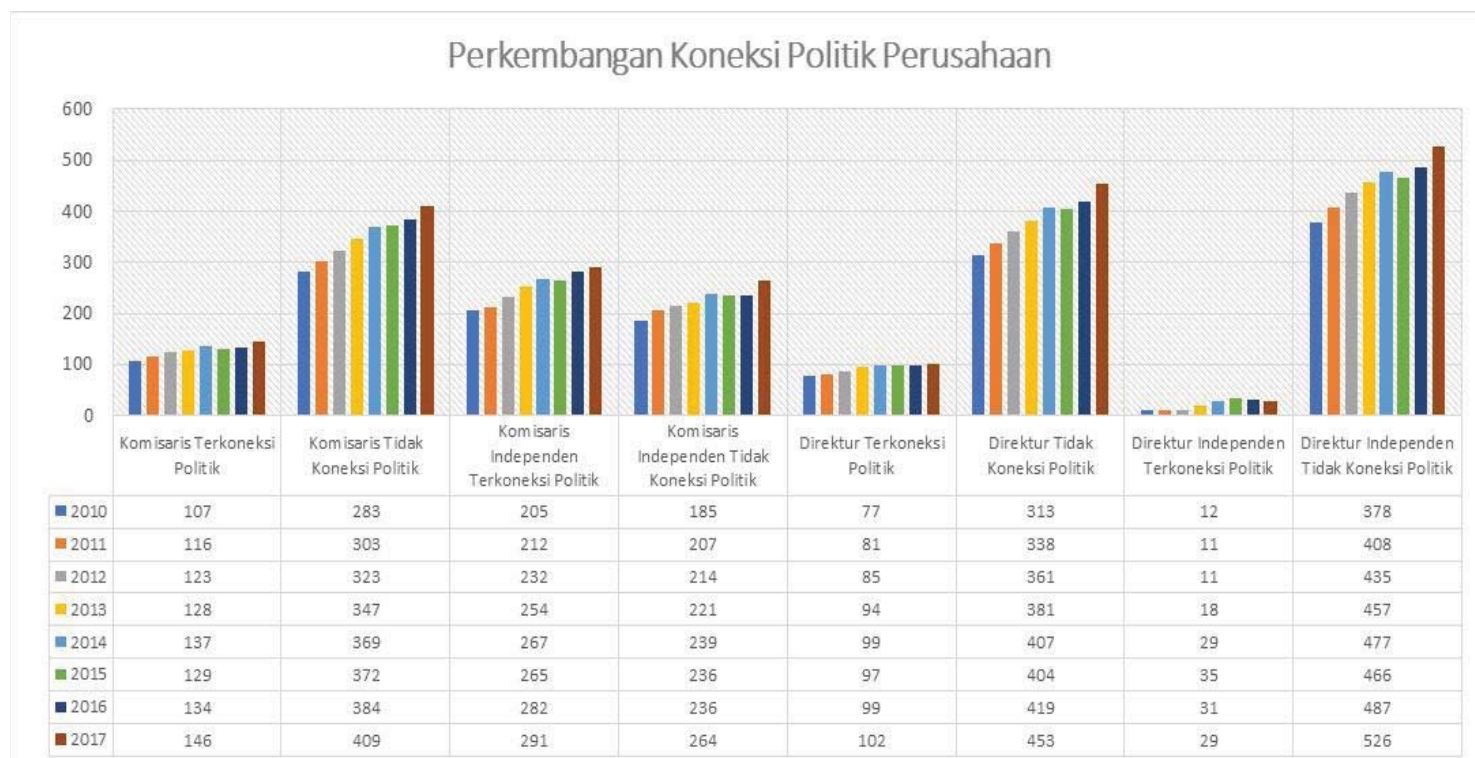
Keanggotaan dewan direktur perusahaan terdiri dari presiden direktur / direktur utama, anggota direktur dan direktur independen. Direktur independen merupakan bagian dari dewan direksi perusahaan yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional perusahaan, di Indonesia direktur independen sudah menjadi persyaratan pada tahun 2001 (Prabowo & Simpson, 2011). Keberadaan dari direktur independen memang tidak diatur dalam undang-undang perseroan terbatas. Namun pihak Bursa Efek Indonesia (BEI) mengenalkan adanya direktur independen dalam perusahaan terbatas melalui surat keputusan direksi BEI No. Kep-00001/BEI/01- 2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Perubahan Peraturan BEI Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham

yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat. Dalam lampiran I bagian III SK direksi BEI tersebut menjelaskan bahwa perusahaan yang tercatat di BEI dan perusahaan yang akan mencatat di BEI wajib memenuhi persyaratan yang diantaranya wajib memiliki direktur independen. Kemudian SK direksi BEI tersebut diperkuat dengan Surat Edaran BEI No. SE-00001/BEI/02-2014 tentang penjelasan masa jabatan komisaris independen dan direktur independen perusahaan yang tercatat (Supriatna & Ermond, 2019).

Koneksi Politik merupakan praktik umum yang dilakukan di Indonesia, dalam artian bahwa menempatkan orang yang memiliki hubungan dekat dengan pemerintah ke dalam jajaran komisaris dan direksi perusahaan, seperti yang terjadi pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sejak masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berlangsung dari tahun 2004-2014, sejumlah komisaris BUMN yang memiliki koneksi politik dengan pemerintah telah dilantik. Di masa Presiden Joko Widodo saat ini juga beberapa pejabat BUMN yang berasal dari mantan pejabat pemerintah dan partai politik diangkat menjadi pejabat di perusahaan BUMN (Pranoto & Widagdo, 2016; Putri, 2018). Ini menunjukkan bahwa keterikatan perusahaan dalam unsur politik merupakan hal yang lumrah dalam struktur organisasi perusahaan BUMN di Indonesia, serta menunjukkan bahwa koneksi politik merupakan hal yang umum terjadi dalam struktur organisasi perusahaan BUMN dan perusahaan swasta di Indonesia. Meskipun begitu, pemerintah juga menyadari bahwa pemilihan direksi maupun komisaris juga memperhatikan keahlian dan kompetensi dari pihak yang menduduki jabatan tersebut serta melakukan uji dan kelayakan untuk menduduki suatu posisi dalam

organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah juga memiliki kepentingan agar BUMN tersebut berkontribusi positif bagi negara (Pranoto & Widagdo, 2016).

Gambar 2. 1 Perkembangan koneksi politik perusahaan dari pejabat komisaris dan direktur



Sumber: Laporan tahunan dan olah data STATA v.16

Berdasarkan grafik di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah perusahaan yang komisaris independen terkoneksi politik dari tahun 2010 – 2017 lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan yang komisaris independen tidak terkoneksi politik, sedangkan dari perkembangan perusahaan yang terkoneksi politik dari komisaris independen dari tahun 2010 – 2017 mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatannya sebesar 5,18%. Berdasarkan grafik di atas juga dapat dijelaskan bahwa dari tahun 2010 – 2017 perusahaan yang direktur independen terkoneksi politik lebih sedikit dibandingkan dengan perusahaan yang direktur

independennya tidak terkoneksi politik, hal ini dikarenakan direktur independen di setiap perusahaan hanya terdiri 1 – 2 orang direktur independen.

Permasalahan yang terjadi adalah peran dan kontribusi dari komisaris independen dan direktur independen dalam menghasilkan luaran perusahaan masih rendah, hal ini dibuktikan pada beberapa penelitian sebelumnya bahwa penunjukan komisaris independen dan direktur independen hanya untuk memenuhi persyaratan semata sehingga menyebabkan tidak berpengaruhnya terhadap biaya hutang perusahaan (Juniarti & Sentosa, 2009; Nurdiniah & Munandar, 2020). Praktik manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan terus meningkat dan tidak dapat dicegah meskipun menghadirkan komisaris independen dan direktur independen perusahaan (Habbash, Xiao, Salama, & Dixon, 2014).

Tata kelola perusahaan di Indonesia masih dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan sebagai pengendali saham, sehingga 73% perekonomian di Indonesia masih dikuasai oleh perusahaan keluarga (Joni, Kamran, & Jane, 2020), oleh karena itu pemerintah Indonesia melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan tentang adanya pihak independen baik dalam struktur dewan komisaris maupun dewan direksi (R. Setiawan & Kusumawati, 2020; Supriatna & Ermond, 2019). Menghadirkan pihak independen dalam perusahaan hanyalah sekedar menaati peraturan yang berlaku namun tidak memberi dampak yang baik bagi perusahaan, sebagaimana pada Tanjung (2020) menemukan bahwa hadirnya pihak independen baik di tubuh komisaris dan direksi perusahaan tidak memberikan pengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Luaran perusahaan merupakan bagian dari penilaian kinerja perusahaan yang terdiri dari : 1) kinerja keuangan (laba, ROA, ROI dll.), 2) kinerja penjualan produk (penjualan, *market share*), dan 3) *return* pemegang saham (*total return* saham, nilai tambah ekonomis) (Richard dkk., 2009). Pada sisi lain juga menjelaskan bahwa luaran perusahaan gambaran tentang yang sudah dikerjakan perusahaan dalam periode tertentu (seperti kinerja, inovasi, hutang) (Bahl, 2013)

Kinerja keuangan merupakan gambaran dari prestasi pengelola perusahaan dalam mengelola aktivitas operasional perusahaan dengan memanfaatkan sumber-sumber daya yang dimiliki perusahaan, serta suatu gambaran prestasi manajemen dalam menghasilkan nilai perusahaan yang dikelola (Klapper & Love, 2002). Kinerja keuangan dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan adalah koneksi politik (Ang, Ding, & Thong, 2013; Faccio, 2006; Fan, Wong, & Zhang, 2014; Fisman, 2001; Wati, 2017).

Perusahaan yang terkoneksi politik dapat menghasilkan laba yang tinggi dan produktivitas lebih besar, karena politik merupakan modal ekonomi yang paling utama dan penting dalam hal menghasilkan laba perusahaan (Agrawal dan Konoeber, 2001). Jika perusahaan memiliki koneksi politik maka perusahaan dapat memuaskan shareholder sehingga dapat mempengaruhi tingkar pasar saham perusahaan (Faccio, 2006). *Political Connection* memberikan dampak positif pada perusahaan yang beroperasi di negara yang memiliki tingkat korupsi tinggi pada tingkat birokrasi, lemah dalam perlindungan hak cipta, intervensi penguasa yang kuat dan pemerintahan yang tidak demokratis (Faccio, 2006).

Perusahaan dikatakan memiliki hubungan koneksi politik apabila salah satu pemegang saham utama (orang yang mempunyai kurang lebih 10% dari total hak suara) atau salah satu top manajemen perusahaan (Presiden, Wakil Presiden, CEO, *Chairman*, atau sekretaris) merupakan menteri, anggota parlemen, atau memiliki hubungan dengan politikus atau partai politik (Faccio, 2006). Ini menegaskan bahwa direktur atau komisaris perusahaan dapat direkrut dari luar perusahaan dengan syarat apabila memiliki koneksi politik. Koneksi politik yang dimiliki oleh dewan direktur secara aktif memberikan kontribusi yang positif pada perusahaan meskipun posisinya sebagai direktur independen (Ang dkk., 2013).

Beberapa studi tentang koneksi politik dari dewan direktur menunjukkan bahwa hubungan koneksi politik dari dewan direktur tidak berpengaruh signifikan terhadap ROE dan *asset turnover* di perusahaan konstruksi di Indonesia (Suhartono & Sany, 2015), apabila salah satu anggota atau pimpinan perusahaan bergabung dalam kabinet kementerian atau terpilih sebagai anggota parlemen, maka harga saham perusahaan naik secara signifikan (Faccio, 2006), pada sisi lain menjelaskan antara persentase dewan komisaris yang terkoneksi politik berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Dalam penelitian Kang & Zhang (2018) bahwa direksi yang berasal dari pemerintah lebih cenderung memiliki masalah dalam menghadiri rapat dewan direksi daripada direksi dari nonpemerintah.

Selain kinerja, hal yang lain yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu biaya hutang (*cost of debt*), beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara koneksi politik perusahaan dengan biaya hutang perusahaan berpengaruh positif sebagaimana yang diungkapkan dalam penelitian (Tee, 2019),

diaman menjelaskan bahwa biaya hutang akan mengalami penurunan jikalau adanya independensi dewan direksi serta komite audit, banyaknya proporsi perempuan dalam dewan direksi, keberagaman etnik dan kontrol dari pemegang saham dari pihak keluarga. Hal serupa disampaikan oleh Bliss & Gul (2012) bahwa koneksi politik pada perusahaan di negara Malaysia memiliki hubungan positif terhadap biaya bunga yang diberikan oleh pemberi pinjaman karena perusahaan yang memiliki koneksi politik, tingkat *leverage* tinggi, kemudian lebih besar melaporkan hasil kerugian yang didapatkan, dan menggunakan perusahaan jasa audit yang berskala besar (*big four*). Selain itu juga bahwa besarnya biaya hutang yang harus dibayar oleh perusahaan juga tergantung koneksi politik dari pimpinan eksekutif atau pimpinan non eksekutif, jikalau pimpinan eksekutif tersebut memiliki koneksi politik maka biaya hutang yang ditanggung oleh perusahaan bisa lebih sedikit (Khaw dkk., 2019).

Disisi lain bahwa koneksi politik perusahaan tidak memiliki pengaruh dengan biaya hutang (Bliss dkk, 2018; Tee, 2018), dikarenakan tergantung dari pimpinan perusahaan tersebut, berdasarkan hasil penelitian Khaw dkk., (2019), menjelaskan bahwa pimpinan perusahaan yang bukan dari kalangan eksekutif tapi memiliki koneksi politik hanya memberikan efek terhadap biaya hutang lebih besar, dikarenakan pihak dari luar perusahaan yang tidak memiliki banyak kekuasaan dalam perusahaan.

Hal yang lain dalam penelitian ini yaitu kualitas laba, beberapa penelitian sebelumnya sudah menjelaskan tentang pengaruh koneksi politik perusahaan terhadap kualitas laba. Hasilnya menjelaskan bahwa kualitas laba perusahaan yang

memiliki koneksi politik dapat dipengaruhi secara positif dari koneksi politik, hal ini sebagaimana disampaikan bahwa kualitas laba perusahaan yang terkoneksi politik akan mengalami peningkatan apabila terjadi peningkatan terhadap efektivitas kegiatan dalam pemerintahan (Harymawan dan Nowland, 2016), namun akan mengalami penurunan apabila kondisi politik menjadi stabil. Pada setiap daerah kondisi politiknya berbeda, jikalau perusahaan tersebut berada pada daerah yang tingkat korupsinya tinggi, maka dimungkinkan perusahaan tersebut akan melakukan pengelolaan laba melalui manajemen akrual atau dengan menggunakan akrual diskresi serta juga akan melakukan manipulasi terhadap hasil penjualan yang mereka dapatkan, sehingga laba yang diperkirakan sebelumnya akan jauh berbeda dengan laba yang dihasilkan (Xu dkk., 2019).

Teori agensi mengungkapkan bahwa laba yang berkualitas itu didapatkan dari perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik, sedangkan perusahaan yang memiliki koneksi politik cenderung menghasilkan laba yang rendah, karena perusahaan yang tidak memiliki koneksi politik yaitu perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga, sedangkan yang memiliki koneksi politik yaitu perusahaan yang tidak dikendalikan keluarga (Hashmi dkk., 2018). Di sisi lain menunjukkan bahwa perusahaan yang komite auditnya memiliki koneksi politik memiliki kualitas laba yang tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang tidak terkoneksi politik, dengan alasan bahwa komite audit yang terkoneksi dengan politik melakukan tugas-tugasnya sebagai pengawasan dengan baik serta mempunyai akses yang baik dalam melakukan pembiayaan ekuitas (Cho dan Song, 2017)

Luaran perusahaan lainnya dalam penelitian ini yaitu riset dan pengembangan (R&D). R&D merupakan kekuatan utama dalam mendorong kemajuan teknologi serta untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, beberapa penelitian sebelumnya telah mengungkapkan efek dari koneksi politik yang dimiliki oleh perusahaan terhadap R&D perusahaan. Dalam penelitian Zhang dan Guo (2019) mengungkapkan bahwa dengan adanya koneksi politik dalam perusahaan, dapat membantu perusahaan untuk dapat memperoleh pinjaman dari pihak bank dalam melakukan kegiatan R&D, hal serupa menyatakan bahwa koneksi politik yang ada dalam perusahaan dapat membantu perusahaan dalam melakukan kegiatan investasi R&Dnya walaupun tingkat politik tersebut berada pada level lokal atau dalam hal ini yang dimaksudkan di daerah (Chen dkk., 2018). Pada penelitian lain mengungkapkan hal yang berbeda bahwa investasi R&D suatu perusahaan akan mengalami peningkatan jikalau perusahaan tersebut kehilangan hubungan politik serta menunjuk pegawai yang berlatar belakang insinyur masuk dalam dewan direksi (Qin dan Zhang, 2019).

Kebaruan atas penelitian ini yaitu pada variabel komisaris independen terkoneksi politik dan direktur independen terkoneksi politik. Hal ini menilai secara langsung koneksi politik dari pihak komisaris independen serta koneksi politik dari direktur independen, dibandingkan pada penelitian-penelitian sebelumnya bahwa koneksi politik hanya dinilai dari perusahaan namun tidak menjelaskan sumber koneksi politik perusahaan tersebut berasal dari mana. Harapan atas penelitian ini dapat bermanfaat di bidang teoritis maupun di bidang praktis.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah komisaris independen terkoneksi politik berpengaruh terhadap biaya hutang?
2. Apakah direktur independen terkoneksi politik berpengaruh terhadap biaya hutang?
3. Apakah komisaris independen terkoneksi politik berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
4. Apakah direktur independen terkoneksi politik berpengaruh terhadap kinerja keuangan?
5. Apakah komisaris independen terkoneksi politik berpengaruh terhadap kualitas laba?
6. Apakah direktur independen terkoneksi politik berpengaruh terhadap kualitas laba?
7. Apakah komisaris terkoneksi politik berpengaruh terhadap riset dan pengembangan?
8. Apakah direktur independen terkoneksi politik berpengaruh terhadap riset dan pengembangan?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk memperoleh bukti tentang pengaruh komisaris independen terkoneksi politik pada biaya hutang

2. Untuk memperoleh bukti tentang pengaruh direktur independen terkoneksi politik pada biaya hutang
3. Untuk memperoleh bukti tentang pengaruh komisaris independen terkoneksi politik pada kinerja keuangan
4. Untuk memperoleh bukti tentang pengaruh direktur independen terkoneksi politik pada kinerja keuangan
5. Untuk memperoleh bukti tentang pengaruh komisaris independen terkoneksi politik pada kualitas laba
6. Untuk memperoleh bukti tentang pengaruh direktur independen terkoneksi politik pada kualitas laba
7. Untuk memperoleh bukti tentang pengaruh komisaris terkoneksi politik pada riset dan pengembangan
8. Untuk memperoleh bukti tentang pengaruh direktur independen terkoneksi politik pada riset dan pengembangan

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dalam bidang teoritis maupun dalam bidang praktis:

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Manfaat teori atas studi ini pada teori agensi, dalam pengelolaan perusahaan tidak terlepas dari konflik antara pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan, yang dikarenakan oleh kepentingan dari masing-masing pihak tersebut, sehingga diperlukan pihak yang bersifat independen, yang tidak memiliki afiliasi secara langsung atau tidak

langsung pada pemilik perusahaan atau pemegang saham dan pengelola perusahaan lainnya, serta memiliki koneksi politik ataupun hubungan external diluar perusahaan dengan pihak lainnya dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan ataupun kelebihan serta informasi yang lebih dalam pengelolaan perusahaan.

- b. Manfaat penelitian ini juga bisa memberikan kontribusi dalam peningkatan dari hadirnya komisaris independen dan direktur independen yang terkoneksi politik untuk mengingatkan fungsi dan perannya sebagai pengawas dan memberikan masukan kepada dewan komisaris serta dewan direksi perusahaan dalam menghasilkan atas luaran perusahaan (kinerja keuangan, biaya hutang, kualitas laba serta penelitian dan pengembangan) yang lebih baik.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat praktis atas studi ini, bisa dijadikan bahan pertimbangan pada pengambilan keputusan oleh pemilik perusahaan berkenaan dengan penentuan atau perekrutan pihak-pihak yang akan mengelola suatu perusahaan.
- b. Manfaat penelitian ini juga bisa memberikan kontribusi kepada pihak pemerintah sebagai regulator dalam mengatur model tata kelola perusahaan publik di Indonesia.
- c. Manfaat praktis lainnya adalah bisa dijadikan sebagai tambahan referensi keilmuan dalam bidang akuntansi manajemen serta pihak-pihak lainnya yang tertarik dengan penelitian yang serupa.